

Abstrak

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak yang bersifat eksklusif atau khusus yang dimiliki oleh para pencipta atau penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Fatwa MUI adalah keputusan atau nasihat yang dikeluarkan oleh lembaga atau individu yang diakui keberadaannya oleh negara dan dikeluarkan oleh seorang mufti atau ulama sebagai tanggapan atau reaksi terhadap suatu permasalahan yang timbul. Pertimbangan hakim merupakan tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan untuk memutuskan permasalahan secara cermat dan menyeluruh berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Pendekatan penelitian menggunakan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Sumber data primer berasal dari putusan pengadilan negeri Surabaya dan untuk data sekunder berasal dari buku, jurnal, undang-undang, karya ilmiah dan literatur lainnya. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan analisis isi dari suatu teks (*content analysis*).

Hasil penelitian ini yang berupa kesimpulan menunjukkan bahwa sengketa merek antara MS GLOW dan PS GLOW yang terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan bahwa PS GLOW mempunyai hak secara eksklusif terhadap merek tersebut karena melakukan pendaftaran merek sesuai dengan peraturan yang ada. MS GLOW melakukan kesalahan dalam pendaftarannya, sehingga dianggap melakukan pelanggaran berupa menjiplak atau meniru merek orang lain. Islam sangat menghormati adanya hak seseorang dengan memberikan perlindungan terhadap HKI yang dituangkan melalui fatwa MUI bahwa HKI dianggap sebagai harta kekayaan yang harus dilindungi sehingga pihak lain yang melakukan penipuan, peniruan atau menjiplak milik orang lain maka dianggap dzalim dan hukumnya haram.

Kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Pertimbangan Hakim, Fatwa MUI

Abstract

Intellectual Property Rights (IPR) are exclusive or special rights owned by creators or inventors as a result of intellectual activities and creativity that are unique and new. An MUI fatwa is a decision or advice issued by an institution or individual whose existence is recognized by the state and issued by a mufti or cleric as a response or reaction to a problem that arises. The judge's consideration is the stage where the panel of judges considers the facts revealed in the trial to decide the issue carefully and comprehensively based on the existing evidence.

This type of research uses library research methods. The research approach uses statutory regulations (statue approach). The primary data source comes from the Surabaya district court decision and secondary data comes from books, journals, laws, scientific works and other literature. The data collection method uses documentation. The data analysis method uses content analysis of a text (content analysis).

The results of this research in the form of conclusions show that the trademark dispute between MS GLOW and PS GLOW which occurred at the Surabaya District Court decided that PS GLOW had exclusive rights to the mark because it registered the mark in accordance with existing regulations. MS GLOW made a mistake in its registration, so it was deemed to have committed a violation in the form of plagiarizing or imitating someone else's brand. Islam really respects a person's rights by providing protection for IPR as outlined in the MUI fatwa that IPR is considered wealth that must be protected so that other parties who commit fraud, imitate or plagiarize other people's property are considered wrongdoers and are haram.

Keywords: Intellectual Property Rights, Judge's Consideration, MUI Fatwa